

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014.” Jakarta.
- . 2016. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.” Jakarta, September.
- . 2015. “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.” Semarang , 5 Mei.
- . 2016. “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.” Semarang, 24 Mei.
- . 2016. “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.” Semarang, 24 Mei.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia V.” Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. 30 Juni. Diakses April 18, 2017. <http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-tidak-menjamin-tidak-ada-korupsi>.
- Cooper, Donald R., dan Pamela S. Schindler. 2006. *Business Research Methods*. 9th. New York: McGraw-Hill.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. “Bab IV Barang Milik Daerah.” Dalam *Pengelolaan Keuangan Daerah Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Tahun 2014*, oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 6. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, Partini, Ratminto, Bambang Wicaksono, Wini Tamtari, Bevaola Kusumasari, dan Mohammad Nuh . 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Cetakan 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hudiyanto, Danang. 2013. “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Aset Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.” Skripsi , Yogyakarta.
- Indrawati, Iin. 2013. “publikasi artikel.” *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*. 1 Agustus. Diakses April 18, 2017.



http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/639_PENGERTIAN%20MATERIIL.pdf.

- Kusufi, Muhammad Syam, dan Niken Kusumawardani. 2013. “Seluk-Beluk Pengauditan dan Peran SPKN Dalam Audit di Pemerintahan Indonesia.” Dalam *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, oleh Abdul Halim dan Syam Kusufi, 369. Jakarta: Salemba Empat.
- Menteri Dalam Negeri . 2016. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .” Jakarta, 11 April .
- Pemerintah Kota Magelang. t.thn. *Pemerintah Kota Magelang*. Diakses Juni 12, 2017. <http://www.magelangkota.go.id/direktori/kategori/sekilas-kota/kondisi-geografis>.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.” Jakarta, 24 April.
- . 2012. “Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Jakarta, 31 Juli .
- . 2004 . “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .” Jakarta , 19 Juli.
- . 2014. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .” Jakarta, 30 September.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods For Business : A Skill-Building Approach*. 6th. Chichester: Wiley.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Cetakan 20. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Cetakan 3. Jakarta: Kencana.
- Walikota Magelang. 2016. “Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Perangkat Daerah.” Kota Magelang, 31 Agustus. Diakses Juni 16, 2016. <http://jdih.magelangkota.go.id/index.php/repository/peraturan-daerah/Peraturan-Daerah/TAHUN-2016/Perda-No.-3-Tahun-2016-ttg-Pembentukan-dan-Susunan-Perangkat-Daerah.pdf/>.



- . 2016. “Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.” Kota Magelang, 21 November.
- Wening, Nastiti S. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidakefektifan Opini BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Komparatif Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman).” Skripsi, Yogyakarta.
- Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research : Design and Methods*. 4th. California: SAGE.



Lampiran 1 Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4515/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Nomor : 2027/UN1/EB/PJ/2017
Tanggal : 20 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Mencari Data

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "EVALUASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG" kepada:

Nama : TRI KARTIKA DEWI
NIM : 13/347666/EK/19429
No.HP/Identitas : 085643293999/3371024205950001
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Lokasi Penelitian : Kota Magelang
Waktu Penelitian : 3 Mei 2017 s.d 2 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196010261992031004